

# EKSPLORASI KEBUTUHAN STAKEHOLDERS TERHADAP INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Siska Yulia Defitri**

Dosen Fakultas Ekonomi UMMY Solok

Email : siska\_yulia@yahoo.com

## ***Abstract***

*This research's aim is to know the perception of stakeholders toward information in financial reporting of local government can fulfill their requirement of financial information. This research also Examination of addition performed in this research is to know influence of responden characteristic to each requirement variable by consumer of information in financial reporting of local government. The hypothesis of this research is that information published in financial reporting of local government requirement the stakeholders, about is the compliance to the rules, financial information, planning and budgeting, narrative information, economic condition and performance, This research's subjects are stakeholders of local government cover the secretary of local government, investor, creditor, local government. Data were collected with the method of purposive sampling with responden in Sumatera Barat. Statistical methods used is test of mean instrument, rank of mean test, an Manova test.*

*The Result indicate that first information requirement and important of stakeholder is financial information, economic condition, performe information planning. narrative information, and last information the compliance to the rules, narrate, Respondent characteristic that is education storey; level and education background simultaneously have an effect on to requirement of information in financial reporting of local government. This matter indicate that requirement of stakeholder financial reporting of local government differ to be influenced by responder characteristic mount education background and education.*

**Keyword:** *Financial Reporting of Local Government, Requirement Of Informations, Monetary Information, Performance Information, Stakeholder Perception.*

---

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pengganti UU Nomor 22 tahun 1999, merupakan implementasi reformasi politik yang telah mengubah tata pemerintahan sebagai refleksi dari tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut tentu adanya suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting dalam kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporan keuangan, sehingga kita dapat melihat segala yang terjadi di dalam entitas tersebut. Melalui pelaporan keuangan, berbagai pihak sebagai *stakeholder* seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pemerintah itu sendiri dapat menggunakan informasi yang terkandung di dalamnya untuk pengambilan keputusan. Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan pemerintah yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness*.

Menurut Paulsson (2006) dalam Yentifa (2010) mengungkapkan bahwa di Swedia para politisi dan manajer senior

pemerintah tidak menggunakan informasi akuntansi akrual yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintahnya. Sementara itu, di Itali para pengguna juga belum memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya (Steccolini, 2002 dalam Yentifa, 2010). Demikian juga dengan di Indonesia, kepala SKPD tidak memanfaatkan secara optimal informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintahan (Fontanella, 2010).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan pelaporan keuangan Pemda. Hasil penelitian di Swedia menunjukkan bahwa *user* tidak memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah karena beban kerja yang berat dan ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang tersedia (Paulsson, 2006 dalam Yentifa, 2010). Steccolini juga menemukan bahwa para pengguna tidak memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002 dalam Yentifa, 2010).

Pengguna Indonesia belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah, hal ini disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintahan terhadap akuntansi pemerintah itu sendiri (Hapsari, 2008). Sementara Martiningsih (2008) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan latar

belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintah oleh masyarakat. Senada dengan Martiningsih, Fontanella (2010) juga menyatakan tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi serta kesesuaian antar informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersaji di dalam pelaporan keuangan mempengaruhi pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kepala SKPD.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunanya. Survey yang dilakukan Texas A&I University tahun 1981 terhadap 241 masyarakat Texas untuk menentukan kebutuhan informasi keuangan *municipal* yang menyimpulkan bahwa informasi yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan masyarakat (Carlson, 1986 dalam Martiningsih, 2008). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Daniels and Daniels (1991) menyimpulkan bahwa informasi yang berisi pelaporan keuangan *municipal* tidak cukup untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu *municipality*. Hasil penelitian Yuliari (2003) juga menyimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban pemerintah berupa Nota Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tidak sesuai

kebutuhan *stakeholder* pelaporan keuangan pemerintah.

Dari pelaporan keuangan yang telah disampaikan oleh pemda selama ini belum diketahui apa yang benar-benar menjadi informasi yang paling dibutuhkan karena dalam pelaporan keuangan terkandung informasi-informasi dalam satu tahun periode pelaporan seperti laporan keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melihat informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang telah diselenggarakan sehingga pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan beriringan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah : Jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dari pelaporan keuangan pemerintah daerah serta apakah tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan *stakeholder* mempengaruhi kebutuhan *stakeholder* atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain: Memberikan kontribusi bagi dunia akademisi yang berkaitan dengan pengembangan literatur mengenai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan

pemerintah. Memberikan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah terhadap informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi riset selanjutnya terkait dengan penelitian kebutuhan pemakai terhadap informasi yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

Ada beberapa jenis pengguna laporan keuangan seperti pembayar pajak, investor, *fee paying recipients*, manajemen dan lain sebagainya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraph 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna pelaporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman Pemerintah.

Misra (2008) menyebutkan hal senada bahwa informasi akuntansi pemerintahan digunakan oleh:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)
2. Badan Pengawas
3. Investor, Kreditor Dan Donator
4. Analisa Ekonomi Dan Pemerhati Pemerintah Daerah
5. Rakyat
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten /kota) lain

### Kebutuhan Informasi Bagi Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian pelaporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam pelaporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (PP No. 24/2005 paragraf 18 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah).

### Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta hasil yang dicapai untuk kepentingan (SAP, 2004):

a. Akuntabilitas

Memper tang g u n g j a w a b k a n pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengvaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan membuat laporan. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan (PP Nomor 24 Tahun 2005: SAP) adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- h. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- i. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia**

Tonggak sejarah reformasi di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 1999. Sebelum Era Reformasi pemerintah berdasarkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharuskan menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN) selambat-lambatnya dua belas bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk pemerintah daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Daerah (PAD). Memasuki Era reformasi dimana salah satu agendanya adalah otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah sebagai implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan bergulirnya perubahan dalam regulasi keuangan negara yaitu dengan dikeluarkannya paket kebijakan pengelolaan keuangan yang terpadu dan komprehensif (*omnibus regulation*), UU No. 17 tahun 2003 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Melfa, 2010).

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia Sebelum Reformasi 1999**

Sebelum Reformasi 1999	Era Reformasi	Setelah Omnibus Regulation
1. Perhitungan Anggaran Negara (Gabungan)	1. Laporan Perhitungan APBD	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin	2. Nota Perhitungan APBD	2. Neraca
3. Perhitungan Anggaran pendapatan Pembangunan	3. Laporan aliran kas	3. Laporan Arus Las
4. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin	4. Neraca Daerah	4. CALK
5. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan tanpa bantuan proyek teknis		
6. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan dengan Bantuan proyek/teknis		

Sumber : Martiningsih, 2008

Keuangan Negara dan otonomi daerah yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyajian pelaporan akuntabilitas keuangan negara juga mengalami perubahan, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2005

Pengguna pelaporan keuangan dalam pemerintah adalah sangat beragam, dan pengguna pelaporan tersebut juga memiliki berbagai keinginan dan kepentingan terhadap pelaporan keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Demski (1973) dalam Patton (1992) dalam Yentifa (2010) yang dikenal dengan *Impossibility Theorms* yang menyatakan bahwa berbagai jenis

pelaporan pemerintah, sehingga menyediakan informasi untuk berbagai kepentingan ini akan sangat sulit. Beberapa penelitian sebelumnya sudah berusaha mengidentifikasi kebutuhan pengguna pelaporan keuangan pemerintah.

Dari latar belakang, perumusan masalah dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menguji apakah informasi yang tersaji dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan informasi apa sajakah yang dianggap penting bagi *stakeholders* yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang diangkat berdasarkan penjelasan di atas adalah:

H1 = Informasi yang disampaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan oleh stakeholder

H2 = Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan stakeholder atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Sarwono dan Martadiredja (2008: 57) menjelaskan riset eksploratif dilakukan untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan suatu masalah. Riset *eksploratif* ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan membantu memformulasikan masalah secara lebih tepat.

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat (*Stakeholder*) sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah persepsi *stakeholder* dengan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Propinsi, Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Propinsi, Inspektorat Propinsi, dan pimpinan perusahaan kategori menengah dan besar sebagai Investor dan Kreditor yang memiliki kantor pusat di Kota Padang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, cara pertama adalah dengan mengumpulkan data sekunder berupa literatur review dan dokumen review. Cara kedua adalah mengumpulkan data primer yaitu mengumpulkan langsung dari jawaban responden dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung atau melalui email.

Dari 248 kuesioner yang dikirim sebanyak 128 kuesioner (51,61%) diterima kembali. Dari 128 kuesioner yang diterima tersebut, sebanyak 21 kuesioner tidak diisi dengan lengkap sehingga tidak dapat diolah kembali. Jadi jumlah data yang bisa diolah sebesar 107 kuesioner (43,15%) dari total kuesioner yang dikirimkan.

## Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi *stakeholders* terhadap



informasi yang tersaji dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah pelaporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Untuk memperoleh data mengenai penilaian *stakeholders* digunakan daftar pertanyaan atau kuesioner dengan menggunakan skala likert. Persepsi yang diungkap melalui daftar pertanyaan diukur dengan skala ordinal. Responden diminta untuk memberikan jawaban sampai seberapa jauh ia setuju atau tidak setuju terhadap semua pertanyaan yang ada.

Variabel kebutuhan *stakeholders* dalam penelitian ini adalah dikembangkan dari hasil penelitian Martiningsih (2008) yang dikembangkan dari penelitian Anthony (1978), Drebin et. Al (1981), Jones (1985), Daniels & Daniels (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study*,1 (1991), Mack & Ryan (2006), dan *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) No. 1* (2007). Pengembangan kebutuhan Stakeholder yang ada dalam penelitian terdahulu didasarkan pada tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai dan memprediksi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja operasional, perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif.

Instrument ini kemudian dikembangkan oleh peneliti menjadi 30 pertanyaan dalam kuesioner. Sehingga variabel informasi yang dijadikan pengukuran informasi yang dibutuhkan *stakeholder* dalam penelitian ini adalah:

1. Informasi Kondisi keuangan yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini informasi keuangan dibutuhkan oleh *Stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.1)
2. Informasi kondisi ekonomi, yaitu informasi untuk menentukan dan memprediksi kondisi unit pemerintah daerah dan perubahan di dalamnya. Dapat dianalisa, informasi kondisi ekonomi dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.2)
3. Informasi Kepatuhan terhadap aturan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku. Hipotesis yang dapat dilakukan yaitu informasi kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.3)

4. Informasi Kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan hipotesa informasi kinerja dibutuhkan oleh stakeholder dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.4)
5. Informasi perencanaan dan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah. Informasi perencanaan dan penganggaran dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.5)
6. Informasi naratif, yaitu informasi yang berisi *overview* operasi pemerintah, deskripsi sebelum laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi naratif dibutuhkan *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Hipotesa H1.6)

Berdasarkan Hipotesis ke-2 penulis, kebutuhan informasi stakeholder atas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendidikan (Hipotesa H 2.1) dan latar belakang pendidikan (Hipotesis, H2.2). Sehingga variable bebas (*independent variable*) penelitian ini adalah pendidikan dan latar belakang

pendidikan. Sedangkan variable terikat (*dependent variable*) adalah kebutuhan *stakeholder* atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dibagi atas 6 subvariabel diatas. Pengukuran variable independen untuk tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : SMA/ sederajat, D3/akademi, S1 dan S2. Untuk masing-masing tingkat pendidikan ini diberikan poin berdasarkan lama studi, dimana SMA/sederajat diberi poin 12 (dua belas), D3/akademisi diberi poin 15 (lima belas), S1 diberi poin 17 (Tujuh belas) dan S2 diberi poin 19 (Sembilan belas). Sedangkan untuk latar belakang pendidikan terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu non akuntansi dan akuntansi. Untuk yang latar belakang pendidikannya non-akuntansi diberi poin 1 (satu), bagi yang latar belakang pendidikannya akuntansi diberi point 2 (dua).

#### **Pengujian Data**

Penelitian terhadap permasalahan pertama adalah apakah jenis informasi yang dibutuhkan *stakeholder* (pengguna) dari pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian rata-rata (TCR) responden pada variabel penelitian digunakan formula Riduwan (2008) dengan kriteria capaian sebagai berikut:

Sangat penting:	skor 84 – 100%
Penting:	skor 68 – 83%
Cukup penting:	skor 52 – 67%

Kurang penting: skor 36 – 51%  
 Tidak penting: skor 20 – 35%

Responden dianggap membutuhkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah bila nilai TCR lebih besar dan sama dengan 68%. Bentuk uji hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H0: TCR < 68 % Terima H0, tolak H1  
 H1: TCR e" 68 % Terima H1, tolak H0

Pengujian tambahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik responden terhadap masing-masing variabel kebutuhan oleh pengguna informasi dalam pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Pengujian ini menggunakan *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA). MANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen kategorikal terhadap variabel *dependent metric* (Ghazali, 2007). Bentuk Hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ho:  $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$  (tidak ada perbedaan)

Ha:  $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_k$  (ada perbedaan)

Sedangkan penentuan *decision rule* adalah:

Jika  $p < \alpha$ , Ho ditolak

Jika  $p > \alpha$ , Ho tidak ditolak

**Tabel 2**  
**Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Responden Atas Kebutuhan Informasi**

No.	Variabel	Rerata	TCR	Keputusan
1	Informasi Kondisi Keuangan	4,10	81,98%	Terima H1
2	Informasi Perencanaan dan Penganggaran	4,08	81,59%	Terima H1
3	Informasi Kondisi Ekonomi	4,04	80,75%	Terima H1
4	Informasi Kinerja	3,97	79,49%	Terima H1
5	Informasi Naratif	3,94	78,79%	Terima H1
6	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	3,94	78,74%	Terima H1
<b>Rata-Rata</b>		<b>4,01</b>	<b>80,22%</b>	

Sumber: Data Olahan dengan SPSS *Versi 16,00 for windows*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa semua item dalam pernyataan dinyatakan valid yaitu hasil korelasi lebih besar dari 0,30 (Sugiyono, 2003:143). Serta bisa dikatakan *reliable* karena *cronbach Alpha* menunjukkan lebih dari 0,6 (Sekaran, 2006).

### Hasil Uji Rata-Rata Kebutuhan Stakeholder

Pengukuran rata-rata instrumen variabel kebutuhan *stakeholder* terhadap informasi yang tersaji dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui secara rinci informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Dari Tabel 2 diperoleh informasi bahwa variabel informasi kondisi keuangan menempati posisi paling utama dan penting sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh *stakeholder*. Hal ini nampak dari nilai rerata sebesar 4,10 dan tingkat capaian 81,98% artinya informasi kondisi keuangan akan menjadi prioritas utama bagi *stakeholder* sebagai informasi untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya. Kemudian dilanjutkan dengan informasi perencanaan dan penganggaran dengan tingkat capaian 81,59% dan nilai rerata 4,08. Informasi kondisi ekonomi merupakan informasi

ketiga sebagai informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat capaian 80,75%, dilanjutkan dengan informasi kinerja, 79,49%, dan 78,79% untuk informasi naratif dan diakhiri dengan informasi kepatuhan terhadap aturan dengan tingkat capaian 78,74% atau rerata 3,94. Berarti semua hipotesa yang disampaikan dalam penelitian ini terhadap kebutuhan informasi *stakeholder* terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan diterima. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981) dan diikuti oleh Jones (1985), diikuti oleh Daniels & Daniels (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No.1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008)

Secara terinci subvariabel sebagai komponen yang menjadi pembentuk variabel ini akan tercakup dalam masing-masing informasi utama yang sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut pada tabel 3.

Dari jenis informasi diatas dapat diikhtisarkan batas minimal jenis pelaporan keuangan pokok pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Neraca

**Tabel 3**  
**Jenis Informasi Utama Yang Dibutuhkan Oleh Stakeholder**

Jenis Informasi	Rata-rata	TCR	Cakupan Dalam Laporan
Perencanaan pemerintah daerah 5 tahun ke depan	4,29	85,79%	Catatan atas laporan keuangan
Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	4,25	85,05%	Laporan Arus Kas
Perencanaan alokasi sumber daya pemerintah daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah	4,24	84,86%	Laporan Arus Kas
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah	4,23	84,67%	Laporan Realisasi Anggaran
Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	4,20	83,93%	Catatan atas laporan keuangan
Dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap perekonomian	4,15	82,99%	Catatan atas laporan keuangan
Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan	4,13	82,62%	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Prediksi ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	4,12	82,43%	Catatan atas laporan keuangan
Laporan pertanggung jawaban kepala pemerintah daerah	4,11	82,24	Laporan Pertanggungjawaban
Prediksi kebutuhan sumber, alokasi dan penggunaan keuangan	4,09	81,87%	Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Data diolah sendiri

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos (IPSAS 1), kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang, dan ekuitas dana

b. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (IPSAS 1 paragraf 126 yang menyatakan bahwa informasi arus kas menyediakan bagi pengguna laporan keuangan sebagai basis untuk menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

c. Laporan Realisasi Anggaran

Pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (SAP No. 02). Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Laporan pertanggung jawaban  
Laporan pertanggungjawaban berisi pernyataan pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Rasuli, 2001 dalam Martiningsih, 2008)
- e. Catatan atas laporan keuangan  
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut (SPAP, 2005):
  - a) Informasi tentang kebijakan fiscal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
  - b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
  - c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
  - d) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkana atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
  - e) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
  - f) Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas
  - g) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keaungan
  - h) Daftar dan skedul

**Tabel 4**  
**Hasil *Multivariate Test***

<b>Effect</b>		<b>F</b>	<b>Sig</b>
Tingkat Pendidikan	Roy's Largest Root	9,147	0,000
Latar Belakang Pendidikan	Roy's Largest Root	10,620	0,000

Sumber: Data Olahan dengan SPSS *Versi 16,00 for windows*

**Uji Manova**

Sebagai analisis tambahan, ingin diketahui juga bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan responden terhadap kebutuhan mereka pada informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis akan menunjukkan apakah ada karakteristik tertentu dari publik (*stakeholder*) yang menyebabkan perbedaan dalam kebutuhan atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan pengujian *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA).

Salah satu bagian dari uji *multivariate* adalah menguji secara serempak (*simultaneously*) efek dari setiap variabel independen terhadap kelompok dependen. (Yentifa: 2010). Tiap-tiap faktor yaitu tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dalam penelitian ini mempunyai efek utama. Pengolahan data dengan program SPSS juga memberikan empat alternatif uji signifikansi *multivariate*, yaitu Pillai's Trace, Wilk's Lambda, Hotelling's Trace dan Roy's Largest Root. Menurut Hair, J. et al (1998) dalam Martiningsih (2008) menyatakan bahwa diantara keempat prosedur dalam

**Tabel 5**  
*Hasil Test of Between- Subject Effects*

Variabel Independen	Kategori	Sig & Mean	Keu	Eko	Patuh	Knrj	Budg	Nar
<b>Tingkat Pendidikan</b>	SMU	<b>Sig</b> 0,000 <i>Mean</i> 25,85	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000
	Diploma	<i>Mean</i> 28,22	25,85	17,77	14,69	16,08	24,38	12,77
	Sarjana	<i>Mean</i> 30,03	28,22	18,67	15,11	13,11	25,00	16,11
	Pasca Sarjana	<i>Mean</i> 27,12	30,03	20,45	15,67	15,88	24,67	16,10
<b>Latar belakang pendidikan</b>	Non-akuntansi	<b>Sig</b> 0,000 <i>Mean</i> 19,95	0,000	0,000	0,000	0,010	0,003	0,000
	Akuntansi	<i>Mean</i> 20,58	19,95	19,95	15,90	15,57	24,96	15,66
		<i>Mean</i> 20,58	20,58	20,58	13,38	17,00	23,00	16,08

Sumber: Data diolah dengan SPSS *Versi 16,00 for windows*



MANOVA tersebut, hasil estimasi Roy's Largest Root termasuk paling baik. Berikut adalah ringkasan hasil uji *Multivariate*.

Hasil uji *Multivariate* menunjukkan bahwa karakteristik responden tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah secara serempak (*simultaneously*). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 2.1 menyatakan bahwa kebutuhan *stakeholder* atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan Hipotesa 2.2 menyatakan bahwa kebutuhan *stakeholder* atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, berdasarkan hasil analisis diatas hipotesis kedua tersebut terdukung. Pengaruh karakteristik responden terhadap variabel kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah selain diuji serempak juga diuji secara individu. Berdasar hasil *test of between effect*, maka dapat dilihat pengaruh karakteristik responden terhadap kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara individu sebagai berikut:

Hasil *test of between-subjects effects* menunjukkan bahwa karakteristik tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi keuangan, informasi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi

anggaran dan informasi naratif begitu juga halnya dengan karakteristik latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi-informasi yang diteliti. Hal tersebut bias dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai mean yang hampir sama atau tidak berbeda secara absolut antar kategori.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini mengidentifikasi jenis informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, kesimpulan yang merupakan inti dari analisis dan pengujian data dapat dijelaskan berikut ini:

1. Penelitian ini mengidentifikasi jenis informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, hal ini terbukti dari hasil pengujian hipotesis 1 yaitu informasi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif dibutuhkan dan penting bagi *stakeholder* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari semua informasi yang disampaikan informasi kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan informasi utama yang

dibutuhkan oleh stakeholder untuk melihat lancarnya program perencanaan dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Karakteristik responden yaitu tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan *stakeholder* pelaporan keuangan pemerintah daerah berbeda dipengaruhi oleh karakteristik responden tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian yang dialami dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel dalam penelitian ini masih kurang sehingga belum mewakili dari semua *stakeholder* yang ada hal ini disebabkan keterbatasan dalam menyebarkan kuesioner sehingga jawaban responden kurang dapat digeneralisasikan secara keseluruhan.
2. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Dimana metode kuesioner ini memiliki keterbatasan berupa lemahnya kontrol terhadap keakuratan jawaban responden karena ada kemungkinan responden tidak menjawab dengan keadaan yang sesungguhnya

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka penelitian selanjutnya dapat memperluas pengambilan sampel baik di Sumatera Barat bahkan bisa untuk diseluruh propinsi yang ada di Indonesia, sehingga hasilnya bisa digeneralisasikan untuk Indonesia. Isu yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya adalah mengetahui informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai atau perlu dikembangkan lagi dengan peraturan, kondisi masing-masing pemerintah daerah maupun *stakeholder*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daniels, Janet D. and Daniels, Craig E. 1991. *Municipal Financial Reports: What Users Want*, *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 Issue 1 pp 15-38
- Fontanela, Amy, 2010, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Periode Tahun 1985-2004*, Skripsi, UII, Yogyakarta
- Ghazali, Imam, 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Variabel SPSS*, cetakan keempat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hapsari, Andhisa Setya, 2008, *Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK*

- (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)
- International Federation of Accountants, 1991, *Public Sector Committee Study No. 1, Financial Reporting by National Governments*
- \_\_\_\_\_, 2000, *Public Sector Committee Study No. 11, Government Financial Reporting*
- International Public Sector Accounting Standards Boards, *International Public Sector Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements*, Issued, January 2007
- Martiningsih, Sri Pancawati, 2009, *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12, Palembang
- Misra, Fauzan, 2008, *Investasi dan Analisis Empiris Praktek Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jawa Tengah)*, Tesis, Universitas Gajah Mada
- Mulyana, Budi, 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2. No. 1. Mei 2006
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Undang-Undang Nomor 25 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat*
- \_\_\_\_\_, 2000, *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta

- \_\_\_\_\_, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta
- Riduwan, 2008, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Peneliti*, Alfabeta, Bandung
- Sarwono, Jonathan dan Martadiredja, Tutty, 2008, *Riset Bisnis Untuk Pengambilan Keputusan*, Andi Offset, Bandung
- Sekaran, Uma, 2006, *Reseach Methods For Business*, Buku 1 dan 2, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta
- Yentifa, Armel, 2010, *Kebutuhan Investor dan kreditor atas Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Andalas, Padang
- Yuliari, Gusti Putu Ayu, 2006, *Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif Mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta